



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 7 Juni 2018.
Pukul	: 13.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017.2. Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018.3. Permasalahan Guru4. Integrasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan SNMPTN5. Pembahasan RKA K/L & RKP K/L Tahun 2019.6. Lain-lain.
Hadir	: 32 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Muhadjir Effendy /Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul **14.56** WIB oleh **Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua** Komisi X DPR RI dan dilanjutkan oleh **Ir.H.A.R. Sutan Adil Hendra, MM/Wakil Ketua** Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyampaikan antara lain:

A.1.Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017

1. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 oleh BPK RI, pembahasan pemeriksaan terkait bidang pendidikan lingkup Kemendikbud RI dari BPK RI yaitu pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik profesional.
2. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik profesional, Kemendikbud RI telah melakukan upaya sbb:
 - a. Menetapkan regulasi, program, dan anggaran untuk mendorong guru, dan tenaga kependidikan lain untuk memenuhi syarat kualifikasi.
 - b. Menerapkan program GGD dan SM3T untuk mengatasi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Mengembangkan aplikasi pendukung pendataan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan lain berbasis data pokok pendidikan (Dapodik).
 - d. Menetapkan pedoman penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), tambahan penghasilan, maupun tunjangan khusus.
3. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan profesional, Kemendikbud RI mengakui masih banyak faktor penghambat.

A.2.Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018.

1. Realisasi daya serap Triwulan I dan pertengahan Triwulan II per-5 Juni 2018 terhadap APBN TA 2018 yaitu:
 - a. Berdasarkan SP2D sebesar **32,16 %**, atau sejumlah **Rp12.893.951.797.000** (*Dua belas triliun delapan ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dari pagu **Rp40.092.000.000.000** (*Empat puluh triliun sembilan puluh dua milyar Rupiah*).
 - b. Berdasarkan SPM sebesar **35,10 %**, atau sejumlah **Rp14.073.765.716.000,-** (*Empat belas triliun tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus enam belas ribu rupiah*) dari pagu **Rp40.092.000.000.000** (*Empat puluh triliun sembilan puluh dua milyar Rupiah*).
2. Kemendikbud RI terus mengawal implementasi program/kegiatan prioritas nasional, yaitu akses, mutu, kebudayaan dan bahasa. Pengawasan utamanya dalam hal realisasi fisik dan realisasi anggaran.

A.3.Permasalahan Guru

1. Jumlah guru secara nasional per-desember 2017 berjumlah **3.017.296** orang yang terdiri dari Guru PNS sejumlah **1.483.265** orang dan guru Bukan PNS sejumlah **1.534.031** orang.
2. Total kekurangan guru PNS di sekolah negeri adalah **988.133** orang. Namun bisa diupayakan cukup dengan **707.324** guru PNS, dengan perhitungan efisiensi (*guru mengajar maksimal 30 jam pelajaran seminggu, dengan multi-grade dan multi-subject teaching*).

3. Adanya jumlah guru yang akan pensiun dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sejumlah **256.950** (*tidak termasuk guru agama*).
4. Pertumbuhan jumlah sekolah dan siswa di sekolah negeri tidak disertai dengan pemenuhan Guru PNS.
5. Ada 53% guru non-PNS di sekolah swasta dari total guru di Indonesia.
6. Jumlah guru PNS yang direkrut jauh lebih rendah daripada yang pensiun.
7. Sebaran guru PNS tidak merata.
8. Sekolah menambal kekurangan guru PNS dengan merekrut guru honorer melalui proses seleksi yang tidak jelas.

A.4.Integrasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan SNMPTN

1. Kementerian yang bertanggungjawab pada sistem pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) dan SNMPTN adalah Kemenristekdikti RI.
2. Kemendikbud RI mendukung kebijakan Kemenristekdikti RI dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru yang tersistem, baik pdss maupun snmptn.
3. Bentuk dukungan yang diberikan Kemendikbud RI kepada Kemenristekdikti RI terbatas pada suplai data sekolah dan siswa yang akan mengikuti seleksi.
4. Suplai data yang diberikan kepada Kemenristekdikti RI bersumber dari Dapodik yang telah diverifikasi dan divalidasi serta disesuaikan dengan kebutuhan data dari sistem PDSS dan SNMPTN dalam bentuk *web service*;
5. Data Kemendikbud RI yang diberikan kepada Kemenristekdikti RI melalui *web service* diantaranya: Nomor pokok sekolah nasional (NPSN), alamat sekolah, nomor induk siswa nasional (NISN), Nama siswa/peserta didik, Tanggal lahir, tempat lahir, Alamat siswa, Akreditasi sekolah, Kurikulum, Nilai rapor, Kab/kota, provinsi, Agama, NIK, dan Jenis kelamin.

A.5.Pembahasan RKA K/L & RKP K/L Tahun 2019.

1. Kemendikbud RI mendapatkan pagu indikatif RAPBN TA 2019 sebesar **Rp 39.217.990.441.000,-** (*Tiga puluh sembilan triliun dua ratus tujuh belas miliar Sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal	1.850.000.000.000,-
Inspektorat Jenderal	192.188.790.000,-
Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	21.162.937.259.000,-
Ditjen PAUD Dikmas	1.850.000.000.000,-
Badan Penelitian dan Pengembangan	1.191.793.566.000,-
Badan Pengembangan & Pembinaan Bahasa	592.062.741.000,-
Ditjen Kebudayaan	1.818.563.878.000,-
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	10.560.444.207.000,-

2. Arah kebijakan RKP Tahun 2019 adalah:
 - a. Pendampingan Pendidikan Karakter, Penjaminan Mutu Pendidikan, Penguatan Vokasi, Beasiswa Unggulan, Penyediaan Sarpras TIK di daerah afirmasi.

- b. Sertifikasi untuk rekrutmen guru baru (estimasi 80 ribu), LMS untuk peningkatan kompetensi guru.
- c. Penjaminan mutu PAUD Dikmas, Perbaikan kelembagaan satuan pendidikan PAUD Dikmas, dan Isu *Stunting*.
- d. Gerakan Literasi Nasional, Diplomasi budaya LN (Indonesia, Karapan Budaya, WCF).

B. Sikap dan Pandangan Komisi X DPR RI

1. Komisi X DPR RI menilai bahwa daya serap triwulan I dan pertengahan triwulan II (per 5 Juni 2018) APBN TA 2018 yang baru mencapai sebesar **32,16%** (berdasarkan SP2D) dan **35,10%** (berdasarkan SPM) perlu lebih dioptimalkan pada triwulan berikutnya.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan langkah-langkah strategis percepatan (akselerasi) penyerapan APBN TA 2018 dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan target yang telah ditetapkan pada RKP dan RKA K/LTA 2018.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI perlu menyusun langkah-langkah inovatif dan strategis untuk menyelesaikan permasalahan guru, utamanya mengenai kekurangan guru PNS, guru menjelang pensiun, dan rencana/usulan rekrutmen guru per-Tahun (2019-2024).
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk terus mendukung program Integrasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dan program-program sejenis lainnya yang secara prinsip memberikan kemudahan calon mahasiswa mengikuti SNMPTN.
5. Komisi X DPR RI telah mengetahui bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 perihal Pagu Indikatif K/L Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp**39.217.990.441.000,-** (*Tiga puluh sembilan triliun dua ratus tujuh belas miliar Sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
6. Dalam pembahasan RKP dan RKA Kemendikbud RI ke depan, Kemendikbud RI perlu:
 - a. menyajikan basis data yang digunakan, rujukan, target dan sasaran dalam penyusunan RKP dan RKA TA 2019.
 - b. menyajikan peta masalah pendidikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, yang antara lain meliputi capaian program prioritas, persoalan peserta didik disabilitas, dan isu-isu aktual yang melahirkan respon masyarakat dan berdampak langsung kepada masyarakat.
7. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian dan pendalaman terhadap bahan yang disampaikan Kemendikbud hari ini, sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RKP dan RKA Kemendikbud RI TA 2019.

C. Lain-Lain

1. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat akan mengagendakan Pembahasan RKP-K/L dan RKA-K/L Tahun 2019 pada tanggal 2 s/d 4 Juli 2018 (*tentatif*), dengan agenda penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, organisasi, dan program kegiatan K/L sesuai hasil pembahasan Banggar pada Masa Sidang V Tahun 2017-2018.
2. Terkait realisasi PIP TA 2018, Komisi X DPR RI meminta kepada Mendikbud RI untuk menyampaikan data Program Indonesia Pintar (PIP) secara terbuka pada semester mendatang.
3. Komisi X DPR RI akan menyelenggarakan Raker yang secara khusus membahas permasalahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Komisi X DPR RI meminta Mendikbud RI untuk menyerahkan penjelasan atau jawaban atas seluruh pertanyaan, masukan dan tanggapan anggota Komisi X DPR RI secara tertulis paling lambat tanggal 28 Juni 2018.

II. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.56 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI**



MUHADJIR EFFENDY

KETUA RAPAT,



DR. IR. DJOKO UDJIANTO, M.M